

	News Title : Peluncuran Bursa CPO Mundur, Ini Alasannya	
	Media Name : detik.com	Journalist : Aulia Damayanti
	Publish Date : 04 August 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 3,000,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 1,000,000
	Section/Rubrication : Berita Ekonomi Bisnis	Topic : Bursa CPO

Peluncuran Bursa CPO Mundur, Ini Alasannya

Aulia Damayanti - detikFinance
Jumat, 04 Agu 2023 09:00 WIB



File: ANDARA FOTO/STYFA YULINNAS

Jakarta - Peluncuran bursa minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) mundur. Sebelumnya bursa tersebut direncanakan meluncur pada bulan Juni 2023.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan, Didid Noordiatmoko. Adapun target Juni 2023 sendiri merupakan arahan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zuhas.

"Ini bulan Juni kami gagal memenuhi sampai sekarang belum mencapai targetnya Juni, sudah lewat. Saya sudah melaporkan kepada Pak Menteri kami mengedepankan kehati-hatian. Karena betta belakangan ini mengenai CPO di Kejaksan membuat kami lebih hati-hati," kata Didid dalam konferensi pers di Double Tree by Hilton Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2023).

Didid mengatakan salah satu alasan mengapa bursa itu belum meluncur karena pihaknya menggunakan prinsip kehati-hatian. Meski demikian, proses Bappebti untuk membentuk bursa berjangka CPO tetap berjalan.

"Kita tetap masih on the track untuk membangun bursa CPO. Bahwa pelaksanaannya lebih, ya saya akui. Kami memang penuh kehati-hatian. Ketika rapat dengan berbagai pihak, pelaku usaha juga bilang tidak mudah," jelas dia.

Didid menjelaskan apa saja yang menjadi konsen Bappebti terkait prinsip kehati-hatian tersebut. Ia menjelaskan pertama banyak kaidah dalam penyusunan sebuah kebijakan yang harus diaki atau diakukan, termasuk uji publik. Didid menegaskan pihaknya tidak ingin peluncuran bursa CPO sekedar seremonial.

"Jadi tidak sekedar seremoni, tetapi ketika ada masukan, kami kaji lagi. Apakah masukan bisa dikejakan atau nggak. Uji publik, tidak semua sehal, beberapa kali, supaya apa? Kami tidak lagi ini penyusunannya semua formalitas," terangnya.

Selain itu, Bappebti juga ingin memastikan Kementerian Lembaga lain yang terkait bisa terlibat dan mengetahui kebijakan bursa CPO. Apa lagi bursa CPO ini kaitannya oleh banyak elemen, dari kebutuhan CPO dalam negeri, ekspor, hingga tata kelola CPO dari hulu hingga hilir.

Adapun Kementerian Lembaga yang akan terlibat di antaranya Ditjen Bea dan Cukai Kementerian, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, hingga Kejaksaan Agung.

Didid menambahkan jika pihaknya tidak ingin membuat kebijakan yang asal-asalan sehingga penanganannya hanya sekejap. Ia mengatakan Kementerian sendiri tidak ingin mengulangi kesalahan yang lalu terkait kebijakan yang berlaku beberapa hari saja.

"Iu jadi tidak bagus. Kalau dihalangi itu agar ini bagus. Apakah akan sempurna? Tidak. Tidak akan sempurna, suatu kebijakan ideal pada saat diumumkan pada satu tahun bisa saja tidak relevan lagi," tuturnya.

Didid mengatakan belum bisa bejari kapan bursa CPO akan meluncur. Namun, ia menegaskan aturan Peraturan Menteri Perdagangannya bisa terbit Agustus 2023 ini.

"Tentu targetnya Agustus ini pemendagriya selesai. Karena Agustus ini masih 20 hari lagi mudah-mudahan selesai. Tetapi Agustus ini kelemu hasil-hai yang tidak produktif," terangnya.

Bursa CPO Agar RI Punya Harga Acuan Sendiri

Dia juga menjelaskan tujuan hadirnya bursa CPO ini agar Indonesia tidak lagi bergantung pada bursa CPO Malaysia dan Rotterdam. Mengingat Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar di dunia.

"Tujuan kenapa CPO masuk ke bursa, supaya Indonesia memiliki price reference: CPO sendiri, agar kita punya harga acuan versi Indonesia. Sebagai negara penghasil CPO terbesar dunia, agar kita tidak memiliki price reference sendiri," jelasnya.

Dia juga menegaskan pembentukan bursa CPO agar Indonesia memiliki harga acuan sendiri. Ia mengatakan pembentukan itu bukan untuk menjatuhkan bursa CPO Malaysia.

"Kita tidak dalam posisi ingin menjatuhkan bursa Malaysia, tidak. Kita ingin punya harga acuan sendiri, itu saja. Jadi, sekali lagi, tujuan utama CPO masuk bursa adalah supaya kita memiliki harga acuan kita sendiri. Bahwa nanti harga acuan itu bisa mempengaruhi harga internasional," terang Didid.

Menurutnya Indonesia dengan Malaysia sendiri tidak ada persaingan terkait CPO. Masalah saat ini kedua negara tengah bekerjasama untuk memperjuangkan nasib CPO yang dipegal akibat kebijakan Uni Eropa yakni UU Anti-deforestasi.

"Iu, bahwa dengan Malaysia, ya kan, teman-teman kemarin waktu acara hari Selasa kemarin, itu CPO terkait dengan undang-undang deforestasi Uni Eropa, ya kan, Indonesia dengan Malaysia ini sekarang sedang sama-sama untuk memperjuangkan CPO di Uni Eropa. Sehingga, posisinya kita tidak bententangan dengan bursa Malaysia," ujar dia.

"Tapi justru kita sama-sama memperjuangkan CPO. Kita sama-sama bernegri memperjuangkan CPO. Jadi, seolah-olah kemarin diulas bursa CPO nggak, jadi-jadi karena saya tau dengan bursa Malaysia," tambah dia.

Hadinya bursa CPO juga bertujuan agar CPO Indonesia lebih bisa bersaing di global. Apa lagi 50% produksi CPO global berasal dari Indonesia.

"Supaya CPO kita bisa diterima di sana. Nah, dan kita tambah satu lagi, kita ingin punya harga referensi, kan gitu. Nah, jadi, kami tentu akan berkolaborasi dengan bursa-bursa yang ada," pungkasnya.

Sebelumnya, Bappebti memang menegaskan bahwa peluncuran bursa berjangka CPO ditargetkan pada Juni 2023 mendatang.

"Di Raker (rapat kerja) kemarin, Pak Menteri Perdagangan minta bulan Juni. Apakah bisa lewat? Akan kami upayakan secepat mungkin. Tetapi, saya tidak menunggui ternyata tidak sempurna yang bisa kita bayangkan," ujar Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko saat sesi Ngobrol Bareng Bappebti di Cissiem 12, Jakarta Pusat, Jumat (3/8/2023).

(detik)